



Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

SIARAN PERS

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Tel: (62 21) 3141308 Fax: (62 21) 3190003



UNTUK DISIARKAN SEGERA

Jakarta 20 Desember 2006 - Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme - PBB) bekerja sama dengan BAPPENAS hari ini mengukuhkan dukungan terhadap pembangunan berbasis masyarakat di Propinsi Papua dan Propinsi Irian Jaya Barat.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Bo Asplund dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Paskah Suzetta hari ini menandatangani naskah kerja sama Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di Papua dan Irian Jaya Barat (People - centered Development Programme in Papua and Irian Jaya Barat/PDP-PIRJA). Kerjasama bermaksud untuk memperkuat dan memfokuskan dukungan berbagai pihak terhadap berbagai upaya pencapaian tujuan Pembangunan Millennium (Millenium Development Goals/MDG), termasuk proses percepatan penanggulangan kemiskinan di kedua propinsi.

PDP-PIRJA dirancang sebagai kelanjutan dari Kajian Kebutuhan Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah, akademisi dan kelompok masyarakat dengan dukungan UNDP. PDP-PIRJA mendukung pengembangan sumber daya pemerintah daerah dan masyarakat madani melalui empat komponen: 1) meningkatkan kemampuan perencanaan kebijakan pembangunan termasuk memperbaiki data, kebijakan, dan berbagai instrumen pembangunan; 2) meningkatkan mutu pelayanan publik; 3) membantu proses monitoring dan evaluasi program-program pembangunan, dan 4) meningkatkan koordinasi berbagai program termasuk kiprah lembaga-lembaga donor di Papua dan Iriabar.

Untuk keterangan lebih lanjut, mohon hubungi:

Pungky Sumadi, Direktur Penanggulangan Kemiskinan. BAPPENAS, tel/fax: (021) 391 5227
Gedsiri Suhartono: (021) 3141308 Ext. 183 atau gedsiri.suhartono@undp.org

Bo memuji pemerintah daerah yang memanfaatkan temuan Kajian untuk merancang strategi pembangunan. Menurut Bo, pendekatan partisipatif mendukung proses dialog antar lembaga setempat serta media yang dapat memperkuat rasa memiliki dan komitmen untuk pencapaian MDG..

“Sebagai negara, Indonesia sudah berada di jalan yang benar dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut, namun ada beberapa kantong kesenjangan yang ingin kami – Perserikatan Bangsa-Bangsa – Bantu. Kendati MDG telah diterima secara global, tujuan-tujuan tersebut tidak ada artinya jika penduduk miskin di wilayah pedalaman dan masih kelaparan, dan belum merasakan ada perbaikan terhadap kehidupannya. Penyebaran AIDS dan malaria di Papua amat parah dibandingkan wilayah lain di Indonesia”, kata Bo dalam sambutannya.

“PDP-PIRJA mengacu pada kerangka acuan memperbaiki koordinasi dan pembelajaran mengenai program-program pengentasan kemiskinan di Propinsi Papua dan Irian Jaya Barat yang diharapkan dapat berlanjut pada kerjasama antar lembaga donor,” kata Bo seraya menambahkan bahwa pembelajaran yang dipetik oleh Pemerintah Daerah serta masyarakat madani diharapkan dapat mengambil kemudi kebutuhan pembangunan Papua sesuai kebutuhan sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia.

“Elemen kunci agenda pembangunan manusia ini adalah memastikan bahwa kabupaten dan kecamatan yang tersebar di Propinsi Papua dan Irian Jaya Barat dapat bergerak maju dalam mencapai target Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015,” kata Bo Asplund dalam sambutannya.

Menurut Bo, Papua merupakan wilayah Indonesia dengan tantangan terberat dalam untuk mencapai MDG. “Keragaman budaya dan geografisnya mencakup lebih dari 250 suku yang tersebar di daerah terpencil. Namun, tantangan berat yang akan dihadapi oleh PDP-PIRJA adalah perbedaan pendapat yang berlanjut di kalangan masyarakat Papua dan Irian Jaya Barat. Untuk itu, PDP-PIRJA melibatkan dukungan dari semua pihak. Komitmen dan rasa memiliki diharapkan akan tumbuh dari Pemerintah Daerah organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media setempat untuk bekerjasama dalam visi yang tunggal. Agenda tersebut akan menjadi lebih kuat ketika seluruh rakyat Papua merasa bangga dan memiliki PDP-PIRJA yang mencerminkan koordinasi, kerjasama, dan kebersamaan komitmen.” tambah Bo.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, dalam sambutannya mengatakan, “Meskipun Propinsi Papua dan Irian Jaya Barat memiliki sumberdaya alam yang besar, namun secara nasional, persentase jumlah penduduk miskin di kedua propinsi ini adalah yang tertinggi.”

Untuk itu, tambah Paskah, kerjasama semua pihak dalam merencanakan program pembangunan yang benar-benar tepat dalam menjangkau masyarakat miskin sangat dibutuhkan. Masih banyak masyarakat di kedua provinsi ini belum sepenuhnya memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan maupun pekerjaan, bahkan di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Hal ini sejalan

Untuk keterangan lebih lanjut, mohon hubungi:

Pungky Sumadi, Direktur Penanggulangan Kemiskinan. BAPPENAS, tel/fax: (021) 391 5227
Gedsiri Suhartono: (021) 3141308 Ext. 183 atau gedsiri.suhartono@undp.org

dengan prinsip utama yang mendasari rancang bangun PDP-PIRJA yaitu kerjasama sinergis antara pemerintah, terutama pemerintah daerah dan masyarakat madani.

Menurut Paskah, kerjasama sinergis pemerintah dan masyarakat akan dapat berlangsung jika masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan membangun. Oleh sebab itu, tambah Paska, pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung atau desa/kelurahan dan kecamatan merupakan kunci utama.

Masyarakat harus didorong untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan pembangunan mereka sendiri; mengakses sumber daya dan dana yang tersedia untuk menyusun dan melaksanakan sendiri program pembangunan yang telah ditetapkan. "Organisasi masyarakat madani wajib membantu upaya pemberdayaan masyarakat ini. Penjabaran Komponen Kedua PDP - PIRJA untuk penyesuaian rancang bangun konsep pemberdayaan masyarakat masih amat terbuka luas untuk dikembangkan berbagai pihak sesuai kearifan lokal," kata Paskah.

Untuk keterangan lebih lanjut, mohon hubungi:

Pungky Sumadi, Direktur Penanggulangan Kemiskinan. BAPPENAS, tel/fax: (021) 391 5227
Gedsiri Suhartono: (021) 3141308 Ext. 183 atau gedsiri.suhartono@undp.org